

## ABSTRAK

**Al Kausar (031324153048).** Kewenangan Penetapan Kerugian Negara Dan Perhitungan Kerugian Negara, dibimbing oleh Rr. Herini Siti Aisyah.

Pemulihan keuangan negara akibat kerugian negara merupakan hal yang harus diutamakan demi mengembalikan keadaan ekonomi negara untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pemulihan keuangan negara diatur dalam paket undang-undang keuangan negara mengenai tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan dimana penetapan nilai kerugian dilakukan berdasarkan subyek/pelaku penyebab kerugian. Selain itu, penetapan nilai kerugian juga dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana sehingga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan nilai kerugian.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum, yakni sebuah proses untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan khususnya mengenai penetapan nilai kerugian negara.

Hasil penelitian dari analisa *Statute Approach* dan *Conceptual Approach* menunjukkan bahwa berdasarkan prosedur hukum administrasi dalam paket Undang-undang keuangan negara, penetapan nilai kerugian negara dilakukan berdasarkan subyek/pelaku penyebab kerugian negara. Sedangkan dalam proses peradilan pidana, kewenangan penetapan nilai kerugian yang dimiliki oleh pengadilan adalah berdasarkan kekuasaan kehakiman. Namun, dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 64 ayat (2) disebutkan bahwa “Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi”, dimana hal tersebut sejalan dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3”.

Dengan demikian terhadap kerugian daerah yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan pidana dan sudah mempunyai keputusan yang bersifat final, tidak serta merta menghapuskan tuntutan ganti rugi. Proses penuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan penerapan hukum pidana terhadap nilai kerugian negara sebaiknya diterapkan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) agar upaya *restoratif* terhadap pemulihan keuangan negara dapat dilakukan secara maksimal. Sedangkan untuk tindakan penyebab kerugian sebaiknya hukum pidana diterapkan sebagai upaya utama (*Premium Remedium*) agar memberikan efek jera.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Kewenangan Penetapan Kerugian Negara, Kepastian Hukum

## **ABSTRACT**

**Al Kausar (031324153048).** *The authority of state loss determination and state loss calculation, supervised by Rr. Herini Siti Aisyah.*

*State loss recovery that caused of state loss is something that should be prioritized for returning state economic condition to support society prosperous. The mechanism of state loss recovery ruled under state monetary law on compensation and treasury prosecution where loss value determination had performed based on subject/doer who causing the loss. In addition, loss value determination also done through criminal judicature mechanism then be able to cause the loss value dissimilarity.*

*Research method that used in this thesis is law research, that is a process to studying rules of regulations in Indonesia related to state loss value determination in particularly.*

*The result of the research from Statute Approach and Conceptual Approach analysis indicated that based on administration law procedure performed based on subject/doer who causing the loss. While in the criminal judicature process, the authority of state loss determination and state loss calculation owned by the court grounded on justice power. However, in Law number 1 of 2004 on State Treasury in Article 64 paragraph (2) stated that "criminal verdict does not free from compensation prosecution", where it was in line with Article 4 Law Number 31 31 of 1999 which state that "state loss returning or state economic did not eliminate the punishment of wrongdoer as mentioned in Article 2 and 3".*

*Thus regional loss that emerged as a cause of criminal action and has final decision, not just eliminate compensation prosecution. Compensation prosecution process held suitable with applicable determination. Related to criminal law application on state loss value as good be applied as a final effort (Ultimum Remidium) in order to restorative effort toward state monetary recovery be able to maximally. While the action that causes of loss ought to criminal law applied as a primary effort (Premium Remidium) in order to give a wary effect.*

*Keywords : State loss, Authority of State Loss Determination, Law Certainty*